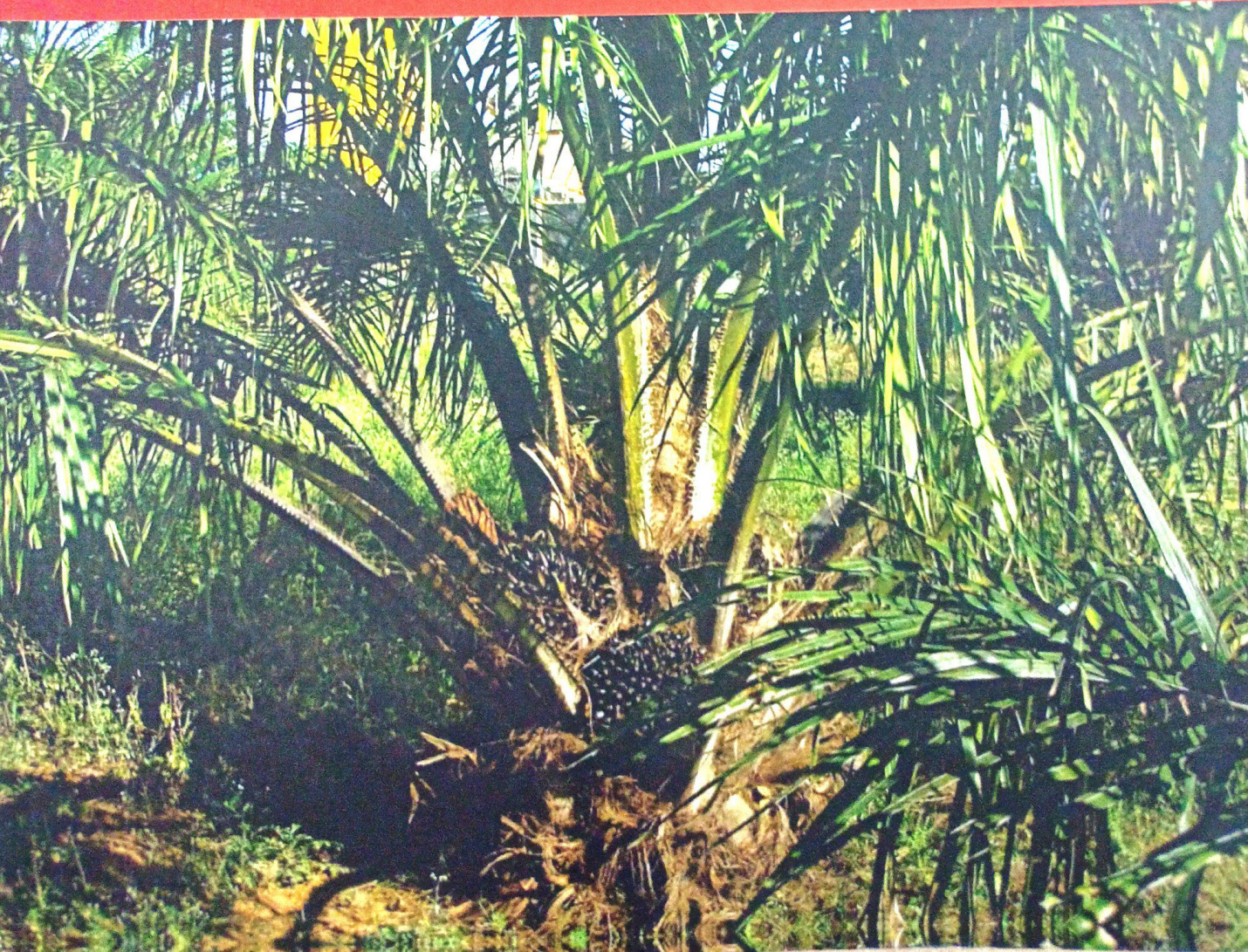




**HASBI ASSIDIQ
MASKUN**

PERLINDUNGAN HUKUM KEANEKARAGAMAN HAYATI

(Relasi Sawit dan Deforestasi)



**PERLINDUNGAN HUKUM
KEANEKARAGAMAN HAYATI
(RELASI SAWIT DAN DEFORESTASI)**

**Hasbi Assidiq
Maskun**

**Penyunting
M. Aris Munandar**

 **Jarrah Publishing
Intermedia**

Perlindungan Hukum Keanekaragaman Hayati
(Relasi Sawit dan Deforestasi)

Penulis

Hasbi Assidiq
Maskun

Penyunting

M. Aris Munandar

ISBN

978-623-7940-82-1

Desainer Sampul & Layouter

AD Rusmianto

Gambar Sampul

pixabay.com/sarangib
pixabay.com/picography

Penerbit

© Jariah Publishing Intermedia

Redaksi

Jl. Dahlia No. 17 Batangkaluku
Gowa – Indonesia, 92111
Telp./WA : +628114440319
Email: jariahpublishing@gmail.com
Web: jariahpublishing.co.id

Cetakan Pertama, September 2021

Dimensi 14 x 20 cm; 258 hlm

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari
Penerbit Jariah Publishing Intermedia

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan hidayah-NYA sehingga narasi Perlindungan Hukum Keanekaragaman Hayati Analisa Relasi Sawit dan Deforestasi dapat diselesaikan. Kami berharap buku ini dapat memperkaya khazanah Perlindungan Hukum Keanekaragaman Hayati, serta dapat mendorong upaya perlindungan yang lebih komprehensif terhadap keanekaragaman hayati.

Naskah ini awalnya merupakan penelitian akhir program sarjana hukum dari Hasbi Assidiq, dengan bimbingan dari Dr. Maskun S.H., L.LM. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Koalisi Masyarakat Sipil untuk Moratorium Sawit yakni ini terdiri atas Sawit Watch, Kaoem Telapak, Forest Watch Indonesia (FWI), Yayasan Madani Berkelanjutan, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK),

Pusaka, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen (JKLPK), Walhi Sulawesi Selatan, Japesda, Greenpeace Indonesia, Kemitraan Partnership, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Konsorsium pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KPSHK), Bahtera Alam, Elpagar, PLH Kaltara dan Yayasan KEHATI, yang telah mendorong perbaikan tata kelola sawit berkelanjutan di Indonesia.

Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Hilma Safitri dan Ibu Rondang Siregar yang telah bersedia memberikan kritikan terhadap naskah ini, sehingga terdapat beberapa hal yang dapat kami perbaiki. Selain itu terima kasih juga kepada Prof. Hariadi Kartodiharjo yang memberikan saran agar ditambahkan analisa terkait dengan pengaruh UU Cipta Kerja terhadap Kehati Indonesia, yang menjadi pengembangan dari naskah awal.

Terima kasih juga kepada kawan-kawan Environment Law Forum yang menjadi ruang bagi penulis untuk berdiskusi dan merawat harapan untuk mewujudkan hukum mendorong perlindungan lingkungan hidup. Kepada Siti Nurhaliza Bachril dan Nurul Habaib Al-Mukarramah yang menjadi kawan tim riset penulis dalam bertukar pikiran dan gagasan terkait dengan lingkungan hidup. Juga

kepada kawan M. Aris Munandar yang telah meluangkan waktunya untuk menyunting naskah ini.

Terakhir karya ini hendak didedikasikan untuk seluruh pejuang konservasi di tanah air. Tentu dalam tulisan ini masih banyak aspek yang belum dibahas secara mendalam dan boleh jadi terdapat kesalahan. Tapi bukan berarti tidak layak untuk diskusikan, sehingga dengan penuh kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk secara konseptual bersama-sama mendorong perlindungan keanekaragaman hayati untuk masa depan generasi kita di masa yang akan datang.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 7 Agustus 2021

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
BAB I. PROLOG	1
BAB II. ANCAMAN EKSPANSI PERKEBUNAN SAWIT TERHADAP KEANEKARAGAMAN HAYATI	9
A. Pengertian Sawit dan Keanekaragaman hayati	9
1. Sawit	9
2. Keanekaragaman Hayati	26
B. Kebutuhan Minyak Nabati Dunia	45
1. Pertumbuhan Jumlah Penduduk dan Kebutuhan Minyak Nabati	45
2. Efisiensi Sawit dibanding Tanaman Lain	48
3. Peningkatan Produksi Sawit	49
C. Relasi Ekspansi Perkebunan Sawit dan Deforestasi	54
1. Deforestasi	54
2. Ekspansi Perkebunan Sawit	59
3. Skema Penguasaan Industri Sawit	63
D. Tata Kelola Sawit	67
1. Regulasi dalam Pembukaan Usaha Perkebunan Sawit	67

	2. Sawit dalam Kawasan Hutan	72
	3. Sawit Berkelanjutan	86
BAB III. SKEMA	PERLINDUNGAN HUKUM	
	KEANEKARAGAMAN HAYATI	103
A.	Perlindungan Hukum	103
	1. Konsep Perlindungan Hukum	103
	2. Paradigma dalam Perlindungan Hukum	
	Lingkungan	107
	3. Arah Baru Paradigma Perlindungan	
	Hukum	114
B.	Skema Perlindungan Keanekaragaman	
	Hayati Internasional	117
	1. Tinjauan Singkat Perkembangan Hukum	
	Lingkungan Internasional	117
	2. United Nations Convention on	
	Biological Diversity 1992	121
	3. Instrumen Hukum Internasional Lain	127
C.	Skema Perlindungan Keanekaragaman	
	Hayati Nasional	136
	1. Tata Kelola Hutan	136
	2. Perlindungan Keanekaragaman hayati di	
	Dalam Kawasan Konservasi	151

3.	Perlindungan Keanekaragaman hayati di Luar Kawasan Konservasi	169
4.	Perlindungan Keanekaragaman hayati di dalam Perkebunan Sawit	178
D.	Analisa Skema Perlindungan Keanekaragaman Hayati Alternatif	187
1.	Penguatan Instrumen Nilai Konservasi Tinggi dan Stok Karbon Tinggi	187
2.	Moratorium Sawit	191
3.	Sawit dalam Kawasan Hutan	196

BAB IV. PENGARUH UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

TERHADAP KEANEKARAGAMAN HAYATI 201

A.	Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja ...	201
B.	Norma bermasalah dalam Undang-Undang Cipta Kerja	207
C.	Proyeksi Dampak Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Kebijakan Perlindungan Keanekaragaman Hayati	214

BAB V. EPILOG 219

DAFTAR PUSTAKA 223

BIODATA PENULIS 243

BIODATA PENYUNTING 246

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Luas Area Dan Proporsi Deforestasi Nasional 2001-2016	56
Tabel 2 Tata Kelola Hutan	141

BAB I PROLOG

Salah satu tantangan yang dihadapi masyarakat dunia saat ini adalah pemenuhan kebutuhan pangan dan energi. Tantangan ini sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang setiap tahun terus meningkat. Pada tahun 2050, jumlah penduduk diproyeksikan mencapai 9,8 miliar. Angka ini meningkat lebih dari 2 miliar, dari jumlah penduduk pada tahun 2019 yang hanya 7.7 miliar jiwa.¹ Untuk memenuhi kebutuhan pangan dan energi dengan jumlah penduduk tersebut, maka minyak nabati menjadi salah satu bahan yang dibutuhkan. Dengan jumlah penduduk sebanyak tersebut, diproyeksikan permintaan minyak nabati akan mencapai 220 juta ton hanya untuk kebutuhan pangan. Jika biodiesel dimasukkan dalam perhitungan, maka dibutuhkan 310 juta ton dalam memenuhi kebutuhan pangan dan energi masyarakat dunia. Angka meningkat hampir dua kali lipat dari tahun 2019 yakni hanya 170 hingga 180 juta ton.²

Untuk memenuhi kebutuhan minyak nabati ini terdapat berbagai tanaman yang bisa digunakan. Setidaknya terdapat 4 sumber minyak nabati utama yang berkontribusi terhadap pemenuhan 85% konsumsi dunia, yakni : (a) Sawit

¹ United Nations 2019 *World Population Prospects 2019 Highlight* United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division, hal 5. Dapat diakses secara daring melalui https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf

² Jean-Marc Roda. 2019. *Politik dunia di balik pengembangan kelapa sawit Indonesia dan Malaysia*. The Conversation. Dapat diakses secara daring melalui: <https://theconversation.com/politik-dunia-di-balik-pengembangan-kelapa-sawit-indonesia-dan-malaysia-120168> diakses pada 6 Juli 2020

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Achmad Ali. 2009, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang*. Kencana. Jakarta
- Andreas Pramudianto. 2014. *Hukum Perjanjian Lingkungan Internasional Implementasi Hukum Perjanjian Internasional Bidang Lingkungan Hidup di Indonesia*. Setara Press. Malang
- 2017. *Hukum Lingkungan Internasional*. Rajawali Press. Depok.
- Anggiana G. Adinugraha, Sitti Hadijah, Frans R. Siahaan (ed) 2018. *Tata Kelola Perkebunan Sawit di Indonesia: Studi Kasus di Provinsi Riau dan Kalimantan Barat*. Forci Development. Bogor
- Christian P.P Purba, (et.al). 2013. *Potret Keadaan Hutan Indonesia*. Forest Watch Indonesia. Jakarta.
- Danrivanto Budhijanto. 2014. *Teori Hukum Konvergensi*. Refika Aditama. Bandung
- Deni Bram, 2014, *Hukum Lingkungan Hidup*, Gramata Publishing; Bekasi.
- Elizabeth A. Widjaja. (et.al). 2014. *Kekinian Kehati Indonesia 2014*. LIPI Press. Jakarta.
- E. Sukara (et.al) *Management of Essential Ecosystem Areas, Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial White*
- Perlindungan Hukum Keanekaragaman Hayati* | 223

Paper 1. Winrock International; USAID; Kementerian Dalam Negeri. hlm. 46

E.Utrecht disadur oleh Moh. Saleh Djindang. 1983. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Ichtiar Baru/Penerbit Sinar Harapan. Jakarta.*

Hariadi Kartodihardjo. 2020. *Dibalik Krisis Ekosistem Pemikiran tentang Kehutanan dan Lingkungan Hidup. LP3ES. Jakarta*

Irfan Bakhtiar (et.al). 2019. *Hutan Kita Bersawit Gagasan Penyelesaian untuk Perkebunan Kelapa Sawit dalam Kawasan Hutan. KEHATI. Jakarta,*

Jamaluddin Jompa (et.al). 2019. *Sains Untuk Biodiversitas Indonesia. Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jakarta*

Jan Horas Veryadi Purba. 2019. *Industri Sawit Indonesia dalam Perspektif Minyak Nabati Global. Kesatuan Press Cetakan pertama. Bogor*

KPK. 2016. *Kajian Sistem Pengelolaan Komoditas Kelapa Sawit, KPK. Jakarta*

Marcus Colchester dan Sophie Chao. 2011. *Ekspansi Kelapa Sawit di Asia Tenggara: Kecenderungan dan implikasi bagi masyarakat lokal dan masyarakat adat, Forest Peoples Programme- Perkumpulan Sawit Watch. England-Indonesia*

- Meijaard, E, (et.al) (ed). 2019. *Kelapa sawit dan Kehati. Analisis situasi oleh Satuan Tugas Kelapa Sawit IUCN. Satuan Tugas Kelapa Sawit IUCN Gland, Swiss.*
- Mohammad Indrawan, Richard B.Primack dan Jatna Supriatna. 2007. *Biologi Konservasi. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.*
- Mustari. 2013. *Perlindungan Hukum bagi Pekerja, Perempuan : Suatu Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. Rayhan Intermedia. Makassar*
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum. Cetakan ke-6, Kencana.Jakarta.*
- 2017. *Penelitian Hukum. Cetakan ketigabelas. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.*
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakri. Bandung,*
- Silvia Nora dan Carolina D.Mual. 2018. *Budidaya Tanaman Kelapa Sawit-Buku Ajar. Pusat Pendidikan Pertanian, Bada Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Kementerian Pertanian.*
- Simon (et.al). 2018. *Menakar Sawit: Riset Kawasan, Korupsi, dan Pendapatan Daerah di Sulawesi dan Kalimantan. Sawit Watch. Bogor.*
- Sonny Keraf. 2014. *Filsafat Lingkungan Hidup, Alam Sebagai Sebuah Sistem Kehidupan Bersama Fritjof Capra. Kanisius. Yogyakarta*

Sophie Chao. 2013. *Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) Dan Penyelesaian Masalah Pengaduan: Panduan tentang pengajuan pengaduan bagi organisasi masyarakat sipil dan komunitas lokal*. Forest Peoples Programme, United Kingdom.

Supriadi, 2010, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.

Wahyuningsih Darajati (et.al). 2016. *Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2015-2016*. BAPPENAS. Jakarta

Yunus Wahid. 2018. *Pengantar Hukum Lingkungan*. Edisi Kedua. Prenadamedia Group Divisi Kencana. Makassar.

Yulia. 2015. *Akses terhadap Biodiversiti dalam Pengaturan Internasional dan Indonesia*. Unimal Press. Lhokseumawe.

Jurnal/Makalah/Laporan Riset/Surat:

Austin, K.G (et.al), "What causes deforestation in Indonesia?", *Environmental Research Letters*. Vol.14 Nomor. 2 Februari 2019

Adrianus Eryan. Dari Inpres Moratorium Sawit Hingga Kebijakan Tata Kelola Industri Sawit Presiden Jokowi: Studi Kasus Penerbitan SK Pelepasan Kawasan Hutan PT Hardaya Inti Plantations di Buol, Sulawesi Tengah, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 6, No. 1, 2019

- Andri. G Wibisana (et.al). 2015. *Laporan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem*. BPHN. Jakarta
- Badan Restorasi Gambut. 2016. *Rencana Strategis Badan Restorasi Gambut 2016-2020 Peraturan Kepala Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia Nomor: P.5/Kb Brg-Sb/11/2016 Tentang Rencana Strategis Badan Restorasi Gambut*, Badan Restorasi Gambut, Jakarta
- Bisari Yadi. 2017. *Ketika sungai menjadi subyek hukum*, Majalah Konstitusi Rubrik "Cakrawala" No.124, edisi Juni, hlm. 43-65 dapat pula diakses secara daring melalui <https://bisariyadi.wordpress.com/2017/08/03/ketika-sungai-menjadi-subyek-hukum/> diakses pada tanggal 12 Mei 2019
- BPEE. (2017). *Peraturan Direktur Jenderal KSDAE tentang Petunjuk Teknis Penentuan Areal Bernilai Konservasi Tinggi di Luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru.*: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial. Jakarta

-----2020. *Laporan Kinerja Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial Tahun 2019*.; Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta

Dharmawan AH, (et.al). 2018. *Pengembangan bioenergi di Indonesia: Peluang dan tantangan kebijakan industri biodiesel*. Working Paper 242 CIFOR, Bogor

Ellen Brown (et.al). 2013. *Panduan Umum Untuk Identifikasi Nilai Konservasi Tinggi*, HCV Resource Network

Ermanto Fahamsyah dan Eusebius Pantja Pramudya. *Sistem ISPO untuk Menjawab Tantangan Dalam Pembangunan Kelapa Sawit Indonesia yang Berkelanjutan*, Masyarakat Indonesia, Vol. 43 No.1, Juni 2017,

Europe Palm Oil Alliance. 2019. *The Palm Oil Story Facts and Figures*. Europa Palm Oil Alliance. EU. hlm. 5-7 dapat juga diakses secara daring melalui <https://palmoilalliance.eu/documentation-center/> diakses pada 6 July 2020

Eyes on the Forest. 2018. *Kebun sawit beroperasi dalam kawasan hutan di Provinsi Riau tanpa izin maupun pelanggaran lainnya, Analisis penggunaan Kawasan hutan berdasarkan SK Nomor 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016, 07 Desember 2016, Tentang Kawasan Hutan di Provinsi Riau*

Laporan investigatif dan analisa pengindraan jarak jauh di 10 perusahaan sawit. Eyes on the Forest. Riau

Fadhil Muhammad Indrapraja. 2017. *Sertifikasi Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan Sebagai Instrumen Penataan Hukum Lingkungan: Analisis Hukum Terhadap Indonesian Sustainable Palm Oil, Roundtable On Sustainable Palm Oil Dan Malaysian Sustainable Palm Oil*, Skripsi Universitas Indonesia, Jakarta.

Fauziah Rasad dan Tito Febismanto, *Korupsi dan Hak Asasi Manusia di Sektor Kehutanan; Studi Kasus Perkebunan Sawit PT. Bulungan Hijau Perkasa*, Laporan Temuan Penelitian Komnas HAM, 2015,

Hariadi Kartodiharjo et.al. 2020. *Lembar Fakta Omnibus Law UU Cipta Kerja*. (Bogor: Forest Digest).

IPBES. 2019. *Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services*. IPBES. Bonn.

IUCN. 2020. *Table 5: Threatened species in each country (totals by taxonomic group)*, IUCN Red List version 2020-1: Table 5 Last updated: 19 March 2020, hlm. 2 dapat diakses secara daring melalui <https://www.iucnredlist.org/resources/summary-statistics> diakses pada 20 September 2020

Indonesia. 2019. *Indonesia 6 th National Report for the Convention on Biological Diversity. The Clearing-House Mechanism of the Convention on Biological Diversity*

----- 2016. *First Nationally Determined Contribution Republic of Indonesia*

Kementerian Lingkungan Hidup. 2007. *Himpunan Perjanjian Internasional di Bidang Lingkungan Hidup*. Kementerian Lingkungan Hidup. Jakarta

Kelompok Masyarakat Sipil. 2017. *Kertas Posisi Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia*, FWI. Jakarta. http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2017/03/FINAL_2.pdf diakses pada 3 July 2020

KLHK. 2018. *Status Kehutanan 2018*, KLHK. Jakarta

----- .2020. *Statistik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2019*; KLHK. Jakarta

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Moratorium Kelapa Sawit Indonesia. 2018. *Rekomendasi Kertas Kebijakan Masyarakat Sipil Untuk Moratorium Sawit, Membumikan Moratorium Dan Evaluasi Perkebunan Sawit*. Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Moratorium Kelapa Sawit Indonesia. Jakarta.

----- 2019. *Shadow Report Kemana Arah Implementasi INPRES No.8 Tahun 2018 Berjalan?*. Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Moratorium Kelapa Sawit Indonesia. Jakarta.

----- 2019. *Satu Tahun Implementasi INPRES Moratorium Sawit: Jauh Panggang dari Api*. Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Moratorium Sawit . Jakarta

KSDAE. 2019. *Statistik DITJEN KSDAE 2018*. Jakarta: Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

LIPI. 2016. *Laporan Tahunan Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya - LIPI Tahun 2015*. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia - Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya-LIPI. Bogor

----- 2020. *Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2019 Pusat Penelitian Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya LIPI*. Pusat Penelitian Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya - LIPI. Bogor.

Lukas R, Wibowo (et.al). 2019. *Penyelesaian Tenurial Perkebunan Kelapa Sawit Di Kawasan Hutan Untuk Kepastian Investasi Dan Keadilan*. Working Paper 247 CIFOR. Bogor.

- Madani. 2020. Madani's Update Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2020 Tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Yayasan Madani berkelanjutan. hlm. 2-4, laporan dapat diakses secara daring melalui: <https://madaniberkelanjutan.id/2020/03/27/peraturan-presiden-no-44-tahun-2020-tentang-sistem-sertifikasi-perkebunan-kelapa-sawit-berkelanjutan-indonesia> diakses pada 4 Juli 2020
- Mahfut. *Indonesia Darurat Konservasi: Sudah Amankah Kebun Raya Kita?* Prosiding Seminar Nasional Biodiversitas Indonesia, Gowa 20 Agustus 2019
- Malassam, D. 2009. *Modul Pembelajaran Mata Kuliah : Perencanaan Kehutanan.* Universitas Hasanuddin.Makassar. hlm. M3-3
- Maskun, (et.al). *Legal protection against forest areas to ensure habitat wildlife in the Wallacea region .* IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 473. 2020
- Synchronization of Indonesian Regulation in Sustainable Palm Oil Management to Reduce Greenhouse Gas Emissions.* IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 423. 2020
- Myrna A Savitri, *Hak Menguasai Negara di Kawasan Hutan : Beberapa Indikator Menilai Pelaksanaannya,* Jurnal Hukum Lingkungan Vol.1 Issue 2, Desember 2014

Nur Hidayati. 2020. *Menuju 2 tahun INPRES Moratorium Sawit Perbaikan Tata Kelola Sudah Sampai Mana*. Webinar Tandan Sawit #4 oleh Sawit Watch pada 19 Mei 2020.

Nurjannah, S., Amzu, E., & Sunkar, A. *Peran Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi Bagi Pelestarian Keanekaragaman Hayati di Perkebunan Kelapa Sawit Provinsi Riau*. Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan Volume 3 Nomor 1 2016, 68-77.

Pan Eco Foundation for Sustainable Development and Intercultural Exchange & Yayasan Ekosistem Lestari. 2008. *Bagaimana Perkebunan Kelapa Sawit di Tripa Beresiko mendatangkan bencana, Berkontribusi terhadap Pemanasan Global dan Membuat Populasi Unik Orangutan Sumatera menjadi Punah : Hutan Rawa Ganbut Tripa, Aceh, Sumatera, Indonesia*. Pan Eco: Switzerland.

Purwanto, E., (et.al) . 2018. *Identifikasi Areal Bernilai Konservasi Tinggi Tingkat Lanskap/Wilayah Administrasi*. Makalah Kebijakan No.2/2018. Tropenbos Indonesia, Bogor

Pusaka. 2019. *Setahun Moratorium Mendesak Negara Memulihkan Hak Masyarakat*. Pusaka. Jakarta

Romain Pirard (et.al). 2020. *Kepemilikan dan dominasi korporasi pada rantai pasok minyak kelapa sawit di Indonesia*. Info Brief 9 Trase.Earth,

- RSPO. 2018. Principles and Criteria for the Production of Sustainable Palm Oil 2018.: Roundtable Sustainable Palm Oil. Kinabalu, Malaysia. dapat diakses secara daring melalui <https://rspo.org/principles-and-criteria-review> diakses pada 4 July 2020
- Samedi. *Konservasi Keanekaragaman Hayati di Indonesia: Rekomendasi Perbaikan Undang-Undang Konservasi*. Jurnal Hukum Lingkungan Volume 2 Issue 2 2015
- Sekar Banjaran Aji. *Moratorium Sawit Jokowi dalam Perspektif Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan ala Politik Hijau*. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Volume 5, Nomor 2, 2019, 186-207.
- Shofia Saleh (et.al). 2019. *Intensifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat: Dari Mana Kita Memulai?*. WRI Indonesia. Jakarta.
- Sigit Riyanto et al. 2020. Catatan Kritis Terhadap UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Pengesahan DPR 5 Oktober 2020). Kertas Kebijakan Edisi 2. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, November. Dapat diakses secara daring melalui https://www.researchgate.net/publication/348558731_Catatan_Kritis_Terhadap_UU_11_Tahun_2020_tentang_Cipta_Kerja

Subadia, M (et.al). 2010. *Kajian Kebijakan Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya Memberikan Kepastian Hukum, Hak Usaha, dan Hak-Hak Masyarakat atas Pemanfaatan Sumberdaya Hutan*. Dewan Kehutanan Nasional. Jakarta

Subagyo, H., & Debora, A. *Ulasan Peraturan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Perkebunan Kelapa Sawit (INPRES Moratorium Sawit)*. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Volume 5 Nomor 1 2018, 137-153. hlm. 137

Surat Edaran Sawit Watch No : 006/SK-PSW/II/2019 tentang *Himbauan Penghilangan penggunaan kata kelapa dalam penyebutan Sawit*.

Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 833/KPTS/SR.020/M/12/2019 Tentang Penetapan Luas Tutupan Kelapa Sawit Indonesia.

Suparto Wijoyo. *Persyaratan Perizinan Lingkungan dan Arti Pentingnya Bagi Upaya Pengelolaan Lingkungan di Indonesia*. *Yuridika* Volume 27 No. 2, Mei-Agustus 2012

Suprayitno. 2008. *Bahan Ajar Teknik Pengelolaan Konservasi Keanekaragaman Hayati*. Departemen Kehutanan, Bogor

- Syukur, C. *Pengelolaan Plasma Nutjah Penelitian dan Pengembangan Perkebunan*. Prosiding Lokakarya Nasional Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Genetik di Indonesia: Manfaat Ekonomi untuk Mewujudkan Ketahanan Nasional. Bogor 2006
- Timmins, H. 2017. *Opsi Legal Perlindungan Hutan pada Lahan Zona Pertanian di Indonesia*. The Forest Trust.
- TuK Indonesia. 2018. *Kuasa Taipan Kelapa Sawit Indonesia di Indonesia 2018*. TuK Indonesia. Jakarta
- UNDP. 2019. *Laporan Kajian Terintegrasi Identifikasi Areal Bernilai Konservasi Tinggi dan Areal Berstok Karbon Tinggi di Kabupaten Pelalawan*. UNDP Indonesia. Jakarta.
- United Nations. 2019. *World Population Prospects 2019 Highlight* United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division dapat diakses secara daring melalui https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf
- Wibowo, A. (et.al) . 2017. *Opini Hukum Dari Reformasi Kembali Ke Orde Baru, Tinjauan Kritis Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2017*. AMAN; Epistema Institute; HuMa
- Wiratno. 2018. *Sepuluh Cara Baru Kelola Kawasan Konservasi di Indonesia : Membangun Organisasi Pembelajar*. DIRJEN KSDAE KLHK. Jakarta

Yulia dan Zinatul Ashiqin Zainol, *Melindungi Kehati Dalam Kerangka Protokol Nagoya*, MIMBAR HUKUM Volume 25, Nomor 2, Juni 2013

Peraturan Perundang-undangan/ Perjanjian Internasional:

United Nations Convention on Biological Diversity 1992

Cartagena Protocol On Biosafety To The Convention On Biological Diversity 2000

The Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization

Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati

Undang-Undang Nomor 5 Undang Undang No. 5 Tahun 1994 Tentang : Pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati)

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014
tentang Perkebunan

*Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan*

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan
*Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on
Biological Diversity* (Protokol Cartagena tentang
Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Kehati)

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013
Tentang Pengesahan Nagoya Protocol on Access to
Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing
of Benefits Arising from Their Utilization to the
Convention on Biological Diversity (Protokol Nagoya
Tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan
Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang
yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi
Keanekaragaman Hayati)*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104
Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan
Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan

*Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang
Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan
Hutan,*

*Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun
2020 Tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa
Sawit Berkelanjutan Indonesia.*

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:
P.30/Menhut-II/2009 Tentang Tata Cara
Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi
Hutan (REDD)

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2018 Tentang Izin Lokasi

Peraturan Menteri Pertanian Nomor
11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem
Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia
(Indonesian Sustainable Palm Oil Certification
System)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.
P.50 MENLHK/SETJEN/ KUM.1/9/2019 Tahun
2019, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.
P.96/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/11/2018 tentang
Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang
Dapat Dikonversi (Permen LHK No 50/2019)

Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam
dan Ekosistem Nomor:
P.6/KSDAE/SET/KUM.1/6/2018 tentang Petunjuk
Teknis Kemitraan Konservasi pada Suaka Alam dan
Kawasan Pelestarian Alam

Online/Website:

Anonym, 2017, PBB: Jumlah Penduduk Dunia 9,8 Miliar Tahun 2050. Tempo. Dapat diakses secara daring melalui : <https://dunia.tempo.co/read/886917/pbb-jumlah-penduduk-dunia-98-miliar-tahun-2050/full&view=ok> diakses pada 5 Juli 2020

Jean-Marc Roda. 2019. Politik dunia di balik pengembangan kelapa sawit Indonesia dan Malaysia. The Conversation. Dapat diakses secara daring melalui : <https://theconversation.com/politik-dunia-di-balik-pengembangan-kelapa-sawit-indonesia-dan-malaysia-120168> diakses pada 6 Juli 2020

Junaidi Hanafiah. 2020. PT. Kallista Alam Tetap Melawan, RAN: Perusahaan Masih Beroperasi di Rawa Tripa. Mongabay. Dapat diakses secara daring melalui <https://www.mongabay.co.id/2020/06/23/pt-kallista-alam-tetap-melawan-ran-perusahaan-masih-beroperasi-di-rawa-tripa/>

<https://www.youtube.com/watch?v=Ni4aak51pik>. Diskusi Online Dua Tahun Moratorium Sawit: Meneruskan Langkah Maju dilaksanakan oleh Auriga Nusantara dan SPOS Indonesia pada 16 September 2020.

<https://bali.bps.go.id/statictable/2018/04/10/47/luas-wilayah-dan-letak-geografis-pulau-bali-dan-kabupaten-kota.html> diakses pada 19 September 2020

<https://balaikliringkehati.menlhk.go.id/rencana-aksi/#Rencana%20Aksi%20Strategis%201> diakses pada 28 September 2020

<https://www.cbd.int/sp/> diakses pada 7 Agustus 2020

<https://www.cbd.int/sp/elements/> diakses pada 7 Agustus 2020

<https://theconversation.com/politik-dunia-di-balik-pengembangan-kelapa-sawit-indonesia-dan-malaysia-120168> diakses pada 6 Juli 2020

<https://rainforests.mongabay.com/sulawesi/> diakses pada 19 September 2020

<https://rspo.org/about/our-organisation> diakses pada 3 Juli 2020

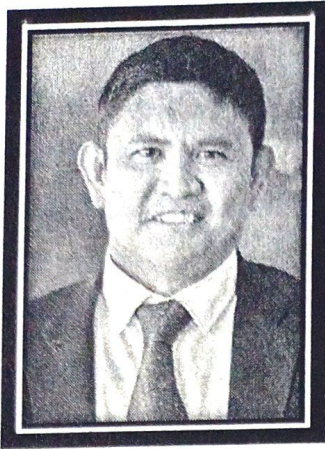
<https://rspo.org/about#vision-mission> diakses pada 4 July 2020

https://www.vice.com/id_id/article/ypkqab/sungai-whanganui-di-selandia-baru-memperoleh-status-setara-manusia diakses pada 12 Mei 2019

<http://phpl.menlhk.go.id/> PHPL, Data Realese DITJEN PHPL. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diakses 3 September 2020

[http://ksdae.menlhk.go.id/assets/uploads/TB%20si%20an](http://ksdae.menlhk.go.id/assets/uploads/TB%20si%20anak%20tiri%20dari%20kawasan%20hutan%20kons)
[ak%20tiri%20dari%20kawasan%20hutan%20kons](http://ksdae.menlhk.go.id/assets/uploads/TB%20si%20an)

ervasi.pdf Qudus, S. Si Anak Tiri dari Kawasan Hutan
Konservasi Taman Buru, Kawasan Hutan yang
ditetapkan sebagai Wisata Berburu. Konservasi
Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



Dr. Maskun, SH., LLM. Menyelesaikan Program Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Program Master pada Fakultas Hukum University of New South Wales, Sydney Australia, dan Program Doktor pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Saat ini penuli aktif mengajar dan melakukan penelitian di

bidang Hukum Lingkungan baik dalam maupun luar negeri. Beberapa karya di bidang Hukum Lingkungan adalah kontributor Hukum Lingkungan: Teori, Kasus dan Legislasi (Penerbit Kemitraan Partnership dan USAID, 2013), Memahami Transformasi Hukum Tidak Tertulis Menuju Hukum Tertulis: Upaya Nyata Penyelamatan Mangrove di Sulawesi Selatan (Penerbit Nasmedia Pustaka, 2018), Analisis Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Kota Makassar (Penerbit Jariah Publishing Intermedia, 2020). Editor pada karya Prof. Dr. A. Muh. Yunus Wahid, S.H., M.Si. yaitu: Aktualisasi Kearifan Lokal: Menuju Hukum Lingkungan yang Responsif (Pustaka Pena Press Makassar, 2011), Hukum Lingkungan dan Hukum Penataan Ruang (Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2014). Disamping buku dengan Tema Hukum Lingkungan, beberapa karya lain adalah Hukum Internasional (Rechta, 2008), Identifikasi Konseptual: Akses Perikanan Negara Tak berpantai dan Negara yang secara Geografis tak beruntung di ZEE Indonesia (Penerbit Arus Timur Makassar, 2012), Filsafat Hukum: Teori dan Praktik (Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2014), Kejahatan Siber: Suatu Pengantar (Penerbit Kencana Prenada Media

Group, 2014), Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet (Penerbit Keni Media, 2017), Korelasi Kejahatan Siber & Kejahatan Agresi Dalam Perkembangan Hukum Internasional (Penerbit Nasmedia Pustaka, 2020). Editor pada karya Prof. Dr. Alma Manuputty, S.H., M. H. (Penerbit Pustaka Pena Press makassar, 2012), karya Prof. Dr. Sukarno Aburaera, S.H. (Penerbit Arus Timur Makassar, 2012), dan Karya Prof. Dr. Syamsul Bachrie, S.H.,M.Si, et.al (Penerbit Nasmedia Pustaka, 2018). Selain karya buku, penulis telah menghasilkan berbagai tulisan jurnal nasional dan internasional di berbagai isu hukum lingkungan dan hukum siber. Saat ini aktif dalam IUCN Academy, Indonesian Society of International Law Lecturer (ISILL), dan Dewan Pembina Environmental Law Forum (ELF). ID Scopus: 57212145425. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail : maskunmaskun31@gmail.com.

Perancangan Undang-Undang (*Legislative Drafting*) yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Keilmuan (LK2) Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2017, Juara 2 Musikalisasi Puisi yang diselenggarakan oleh Ikatan Keluarga Mahasiswa Bidikmisi Universitas Hasanuddin tahun 2017, Juara 3 Kompetisi Karya Tulis Ilmiah Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2018, Juara 1 Lomba Cipta Puisi dalam Semarak Milad 21 Tahun Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) tahun 2019, Kontributor Terpilih Lomba Cipta Puisi Nasional yang diselenggarakan oleh Penerbit Jendela Sastra Indonesia tahun 2020, Top 10 Pemakalah Pada Seminar Nasional dan *Call Paper* Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung tahun 2020, serta menjadi finalis di beberapa kompetisi kemahasiswaan lainnya. Penyunting dapat dihubungi melalui via *e-mail*: m.arismunandar85@yahoo.co.id.



Pada bagian pertama buku ini menguraikan relasi ekspansi perkebunan sawit dan deforestasi yang menjadi ancaman terhadap keanekaragaman hayati di Indonesia. Pada bagian kedua diuraikan skema perlindungan keanekaragaman hayati baik dalam perspektif hukum internasional, hukum nasional, hingga secara spesifik pada perlindungan keanekaragaman hayati dalam perkebunan sawit. Pada bagian terakhir diuraikan secara singkat dampak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja terhadap keanekaragaman hayati di Indonesia.

 Jarrah Publishing
Intermedia

Jl. Dahlia No. 17, Batangkaluku
Gowa - Indonesia, 92111

Email: jarrahpublishing@gmail.com

Web: <https://jarrahpublishing.co.id>

ISBN 978-623-7940-82-1



9 786237 940821